**Analisis Bentuk-Bentuk Sistem Informasi Manajemen Dalam Pelayanan Administrasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat**

***Analysis of Management Information System Forms in Public Administrative Services at the Communication and Informatics Office of West Sumatra Province***

**Hirva Yonanda****1\*, Salaisya Amani Fatiha2, Syukri Ananda Dwi Zulfa3,**

**Vania Moza Khalila4, Yulia Hanoselina5**

Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

*Email :* [*yonandahirva@gmail.com1*](mailto:yonandahirva@gmail.com1*%20) *,* [*salaisyaamanifatiha@gmail.com2*](mailto:salaisyaamanifatiha@gmail.com2%20%20) *,* [*zulfasyukri2804@gmail.com3*](mailto:zulfasyukri2804@gmail.com3)*\** [*vaniamozakhalila@gmail.com4*](mailto:vaniamozakhalila@gmail.com4%20) *,*  [*yuliahanoselina@fis.unp.ac.id5*](mailto:%20yuliahanoselina@fis.unp.ac.id5%20%20)

|  |  |
| --- | --- |
| **Article Info**  Article history :  Received : 26-04-2025  Revised : 28-04-2025  Accepted : 30-04-2025  Pulished : 02-05-2025 | ***Abstract***  *This study aims to analyze the implementation of the Management Information System (SIM) at the Communication and Informatics Office (Diskominfo) of West Sumatra Province in the context of digital transformation in local government. Using a qualitative method that includes observation and in-depth interviews, this research identifies the challenges and progress faced in the application of SIM. The results show that Diskominfo has successfully developed 141 applications and 65 websites, reflecting its commitment to the digitalization of public services. However, significant challenges such as limited human resources, budget constraints, and resistance to technological change remain obstacles. Diskominfo responds to these challenges through intensive training, adjustment of work targets, and flexible evaluation mechanisms. These findings provide important insights into the dynamics of SIM implementation at the local government level and emphasize the importance of institutional adaptability and collaboration in achieving successful digital transformation. This research is expected to serve as a reference for developing strategies to optimize technology-based public administration services in Indonesia.*  *Keywords* : *Management Information System, Digital Transformation, Communication and Informatics Office.* |

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Sumatera Barat dalam konteks transformasi digital pemerintahan daerah. Dengan menggunakan metode kualitatif yang meliputi observasi dan wawancara mendalam, penelitian ini mengidentifikasi tantangan dan kemajuan yang dihadapi dalam penerapan SIM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Diskominfo telah berhasil mengembangkan 141 aplikasi dan 65 website, yang mencerminkan komitmen terhadap digitalisasi layanan publik. Namun, tantangan signifikan seperti keterbatasan sumber daya manusia, kendala anggaran, dan resistensi terhadap perubahan teknologi masih menjadi hambatan. Diskominfo merespons tantangan ini melalui pelatihan intensif, penyesuaian target kerja, dan mekanisme evaluasi yang fleksibel. Temuan ini memberikan wawasan penting tentang dinamika implementasi SIM di tingkat pemerintahan daerah dan menekankan pentingnya adaptabilitas kelembagaan serta kolaborasi dalam mencapai keberhasilan transformasi digital. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan strategi optimalisasi layanan administrasi publik berbasis teknologi informasi di Indonesia.

**Kata Kunci: Sistem Informasi Manajemen, Transformasi Digital, Dinas Komunikasi dan Informatika*.***

**PENDAHULUAN**

Era informasi ditandai dengan kemajuan teknologi yang pesat dan arus informasi tak terbatas secara global. Dalam era modern ini, sistem informasi menjadi kebutuhan vital bagi setiap organisasi, lembaga, dan badan usaha. Penggunaan teknologi informasi dan perangkat komputer telah menjadi hal umum di masyarakat. Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang terintegrasi sangat penting untuk meningkatkan kelancaran arus informasi, stabilitas kualitas, dan kerja sama tim yang efektif. Organisasi yang telah menerapkan otomatisasi dalam fungsi manajerial perlu terus mengikuti perkembangan teknologi dengan membangun SIM terintegrasi. Perkembangan informasi manajemen dan teknologi pendukungnya dapat memicu transformasi signifikan dalam bidang bisnis dan manajemen (Suri & Puspaningrum, 2020).

Pada zaman sekarang, informasi dianggap sebagai kebutuhan hidup setiap orang seperti halnya sandang, pangan, dan papan. Banyak kali, berbagai aspek kehidupan manusia telah dipengaruhi oleh informasi. Ini termasuk bidang teknologi, ilmu pengetahuan, ekonomi, dan sosial budaya. Dalam menjalankan kegiatannya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah banyak mengubah perspektif dan gaya hidup masyarakat Indonesia. Teknologi informasi dan peranannya telah merevolusi banyak hal, tetapi kemajuan ini belum diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia, yang sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi.(Lipursari, 2013)

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah paradigma penyelenggaraan layanan administrasi publik di berbagai negara termasuk Indonesia. Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan menjadi kebutuhan mendasar untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan kepada masyarakat (Indrajit, 2022). Penerapan *e-government* di Indonesia telah menjadi agenda prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang mendorong seluruh instansi pemerintah untuk mengadopsi teknologi informasi dalam penyelenggaraan layanan publik (Napitupulu et al., 2020).

Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah proses terstruktur yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, memulihkan, dan memeriksa berbagai data yang diperlukan oleh suatu organisasi, terutama dalam konteks sumber daya manusia (Handoko, 2012: 237). SIM memiliki empat indikator utama: akurasi, kecepatan, relevansi, dan integritas (McLeod, Neurani dan Ferdian, 2018).

SIM memegang peranan strategis dalam mendukung proses pengambilan keputusan dan pelayanan publik di lingkungan pemerintahan. SIM memungkinkan pengelolaan data dan informasi secara terintegrasi sehingga menghasilkan layanan yang lebih responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat (Laudon & Laudon, 2021). Namun demikian, implementasi SIM dalam organisasi pemerintah masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, kompetensi sumber daya manusia, dan interoperabilitas antar sistem yang mempengaruhi efektivitas layanan publik (Mulyono, 2023).

Sebuah studi yang dilakukan di kantor distrik Rajadesa menunjukkan bahwa SIM memengaruhi efektivitas pekerjaan pekerja. Semakin banyak sim yang digunakan, semakin efektif pekerjaan yang dihasilkan, menunjukkan bahwa itu dicapai dengan mencapai tujuan, kualitas kerja, kepuasan kerja dan berbagai aspek lainnya. Rajadesa memiliki hubungan antara SIM dan efek kerja, tetapi hubungan dengan hanya 11,5% kontribusi diklasifikasikan sebagai lemah. Ini menunjukkan bahwa ada banyak variabel lain yang belum diselidiki dan yang dapat mempengaruhi hasil ini (Puspisari, 2023). Penggunaan aplikasi SIM yang optimal diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, meningkatkan layanan dan mempercepat proses keputusan, seperti yang terlihat di Seagion Dewi (2013). Oleh karena itu, sangat penting bagi bisnis untuk mendukung SIM dengan teknologi yang tepat dan memberikan pelatihan SDM yang berkelanjutan.

Di tingkat daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola sistem informasi pemerintahan dan memastikan transformasi digital berjalan sesuai dengan arah kebijakan nasional. Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu daerah yang sedang berkembang dalam implementasi *e-government*, telah menunjukkan komitmen untuk memperkuat infrastruktur teknologi informasi melalui berbagai program strategis (Yunis et al., 2022). Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2019, Dinas Kominfo diberikan mandat untuk mengembangkan sistem informasi terpadu yang mendukung pelayanan administrasi publik yang lebih efektif dan efisien (Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, 2019).

Kendati demikian, optimalisasi layanan administrasi publik di Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat masih menghadapi berbagai kendala teknis dan non-teknis. Hasil studi pendahuluan menunjukkan adanya kesenjangan antara ketersediaan perangkat pendukung SIM dengan pemanfaatannya secara optimal dalam proses layanan administrasi (Hidayat, 2023). Faktor-faktor seperti inkonsistensi data, keterbatasan bandwidth, dan kurangnya integrasi antar sistem menjadi hambatan signifikan yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas layanan (Zulhendra & Putri, 2022).

Perkembangan teknologi informasi membawa perubahan signifikan dalam metode penyebaran informasi kepada masyarakat, khususnya melalui media online. Namun, di Kota Padang, upaya Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dalam menyampaikan informasi melalui platform digital belum sepenuhnya efektif. Hal ini terlihat dari rendahnya minat masyarakat dalam mengakses informasi yang disediakan, yang menunjukkan bahwa kualitas informasi yang diberikan masih belum sesuai dengan harapan.

Menurut Tata Sutabri (2012), kualitas informasi dapat ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu akurasi, ketepatan waktu, dan relevansi. Ketika informasi yang disajikan tidak memenuhi kriteria ini, dampaknya bisa memengaruhi tingkat kepercayaan dan keterlibatan masyarakat terhadap media informasi resmi yang dikelola pemerintah. Diskominfo Kota Padang telah memanfaatkan berbagai media online seperti situs web, Facebook, Instagram, dan YouTube untuk menyebarkan informasi. Namun, berdasarkan data tahun 2020, meskipun sebanyak 63,61% penduduk Kota Padang atau sekitar 578.240 orang telah mengakses internet, jumlah interaksi seperti views atau likes di platform Diskominfo masih sangat rendah, tidak mencapai angka 1000. Kondisi ini menandakan bahwa informasi yang disajikan belum cukup menarik perhatian masyarakat.

Permasalahan lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia di bidang informasi dan komunikasi publik yang menghambat optimalisasi penyampaian informasi. Minimnya tenaga kerja berdampak pada lambatnya produksi dan distribusi informasi yang berkualitas, sehingga seringkali informasi tidak dapat disampaikan secara tepat waktu. Strategi komunikasi yang efektif sangat diperlukan agar informasi yang diberikan oleh pemerintah dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Ruliana (2019) menyatakan bahwa keberhasilan penyampaian pesan sangat ditentukan oleh strategi komunikasi yang diterapkan. Oleh karena itu, Diskominfo Kota Padang perlu menyusun strategi yang lebih komprehensif dalam meningkatkan kualitas informasi melalui media online agar dapat menarik perhatian dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Penelitian terdahulu tentang implementasi SIM di lingkungan pemerintah daerah telah mengidentifikasi pentingnya perangkat pendukung sebagai enabler dalam transformasi digital layanan publik. Studi yang dilakukan oleh Permana (2021) di pemerintahan Kota Padang menunjukkan bahwa ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai berkorelasi positif dengan peningkatan kualitas layanan administrasi. Sementara itu, Ahmad et al. (2023) menekankan pentingnya pendekatan socio-technical dalam implementasi SIM untuk memastikan keselarasan antara aspek teknologi, proses bisnis, dan sumber daya manusia. Namun, belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi perangkat pendukung SIM dalam konteks optimalisasi layanan administrasi publik di Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut, studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perangkat pendukung Sistem Informasi Manajemen dalam upaya optimalisasi layanan administrasi publik di Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi jenis perangkat pendukung yang digunakan, tetapi juga mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasinya serta dampaknya terhadap kualitas layanan administrasi publik (Sutabri, 2022). Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan strategi optimalisasi layanan administrasi publik berbasis teknologi informasi di lingkungan pemerintah daerah.

**METODE PENELITIAN**

Bagian metode penelitian berisi bahan dan alat, lokasi penelitian, uraian masalah atau alasan penelitian, metode/cara pengumpulan data (survei atau perancangan percobaan), dan analisis data. Pendahuluan ditulis dengan font Times New Roman-12, spasi 1,15. Tiap paragraf diawali kata yang menjorok ke dalam sekitar 1 cm dari tepi kiri tiap kolom.

Penelitian ini dilaksanakan di Lantai 3 Kantor Gubernur Sumatera Barat, yang terletak di Jalan Jendral Sudirman No 51, Padang Barat, Kota Padang. Pemilihan lokasi ini sangat strategis, mengingat kantor gubernur merupakan pusat pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan di bidang teknologi dan komunikasi di tingkat pemerintahan daerah. Penelitian ini dilakukan pada pukul 15.00 WIB pada tanggal 7 Maret 2025, waktu yang dipilih untuk memastikan bahwa pegawai yang menjadi subjek penelitian dapat memberikan informasi yang relevan dan akurat mengenai pengalaman mereka di tempat kerja.

Subjek penelitian ini terdiri dari pegawai yang bekerja di bidang teknologi dan komunikasi di Kantor Gubernur Sumatera Barat. Pegawai yang terlibat dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yaitu mereka yang memiliki pengalaman langsung dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang sejalan dengan topik wawancara kami yaitu penerapan Sistem Informasi Manajemen (SIM). Pemilihan subjek ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai dinamika, tantangan, dan inovasi yang dihadapi oleh pegawai dalam menjalankan tugas mereka di era digital yang terus berkembang. Dengan melibatkan pegawai dari berbagai latar belakang dan jabatan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai situasi yang ada.

Desain penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah kombinasi antara observasi dan wawancara mendalam. Pendekatan ini dipilih untuk menggali informasi yang lebih komprehensif dan mendetail mengenai pengalaman serta apa saja bentuk-bentuk produk SIM yang mereka kembangkan. Observasi dilakukan untuk memahami interaksi dan dinamika kerja di lingkungan kantor, sedangkan wawancara mendalam bertujuan untuk mendapatkan perspektif individu yang lebih dalam. Menurut Sugiyono (2017), "penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari perspektif individu yang terlibat, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih kaya dan mendalam."

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah kualitatif, yang memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna dan pengalaman subjektif dari individu, serta memahami konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi perilaku (Denzin & Lincoln, 2011).. Hal ini sejalan dengan pendapat Moleong (2018) yang menyatakan bahwa "penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena sosial dan perilaku manusia dalam konteksnya."

Definisi operasional dalam penelitian ini mencakup dua instrumen utama, yaitu wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data melalui tanya jawab langsung dengan pegawai, guna mendapatkan informasi mendalam mengenai pengalaman dan pandangan mereka. Wawancara ini dirancang dengan pertanyaan terbuka yang memungkinkan responden untuk menjelaskan pandangan mereka secara bebas dan mendalam. Sementara itu, observasi digunakan untuk memahami konteks dan dinamika interaksi di tempat kerja, termasuk bagaimana pegawai berkolaborasi, menggunakan teknologi, dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pegawai kantor, yang dirancang untuk mendapatkan informasi yang kaya dan mendalam mengenai pengalaman serta pandangan pegawai terkait teknologi dan komunikasi terkhusus mengenai produk produk SIM. Wawancara ini dilakukan secara tatap muka, dengan catatan yang diambil untuk memastikan bahwa semua informasi yang diberikan oleh responden tercatat dengan baik. Selain itu, observasi juga dilakukan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara. Observasi ini mencakup pengamatan terhadap interaksi pegawai, penggunaan perangkat teknologi, serta suasana kerja di kantor.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi dianalisis dengan cara mengidentifikasi tema-tema utama, pola, dan hubungan yang muncul dari data. Proses analisis ini mengikuti langkah-langkah yang diusulkan oleh Miles dan Huberman (1994), yang mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat mengorganisir data secara sistematis dan menghasilkan temuan yang relevan dan bermakna.

Secara keseluruhan, jenis penelitian ini adalah observasi, yang bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi di lapangan melalui pengamatan langsung dan interaksi dengan subjek penelitian. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman tentang bagaimana pegawai di bidang teknologi dan komunikasi beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tantangan yang dihadapi dalam lingkungan kerja mereka.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Sumatera Barat merupakan institusi kunci dalam proses transformasi digital pemerintahan daerah yang kompleks dan dinamis. Diskominfo Provinsi Sumatera Barat didirikan berdasarkan landasan hukum Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan diperkuat dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2018, lembaga ini memiliki misi strategis untuk mengembangkan sistem informasi manajemen yang komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan pemerintahan daerah.

Sebagai lembaga yang berada di garda depan transformasi digital di pemerintahan daerah, Diskominfo Sumatera Barat memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa teknologi informasi menjadi bagian integral dari pemerintah daerah. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memberikan fondasi yang kuat bagi operasi Diskominfo Provinsi Sumatera Barat. Dengan tujuan akhir untuk menciptakan birokrasi yang modern, profesional, dan berdaya saing tinggi, peraturan ini berfungsi sebagai pedoman utama untuk membangun pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi, efektif, dan efisien.

Struktur organisasi Diskominfo Provinsi Sumatera Barat dirancang secara sistematis dengan tiga fokus utama yaitu pengembangan aplikasi, tata kelola, dan infrastruktur teknologi informasi. Pendekatan unik yang diterapkan adalah model pengembangan aplikasi yang bersifat akomodatif dan non-komersial, di mana setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat mengajukan kebutuhan sistem informasi melalui mekanisme formal. Melalui web help desk yang inovatif, proses pengajuan dan monitoring perkembangan aplikasi dapat dilakukan secara transparan dan efisien.

Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2018 memperkuat keberadaan dan legitimasi Diskominfo di tingkat daerah. Peraturan ini memberikan payung hukum yang jelas bagi lembaga tersebut untuk menjalankan berbagai fungsi dan tugasnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Model pengembangan aplikasi yang akomodatif dan non-komersial adalah salah satu pendekatan kreatif yang digunakan oleh Diskominfo Provinsi Sumatera Barat. Metode ini dimaksudkan untuk memberi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) fleksibilitas untuk mengajukan kebutuhan pengembangan sistem informasi sesuai dengan prioritas dan urgensi mereka sendiri. Oleh karena itu, OPD memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses digitalisasi. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas koordinasi antarinstansi dan mempercepat implementasi kebijakan dan program pemerintah yang berbasis TI.

Dengan berbagai inisiatif yang dilakukan, Diskominfo Provinsi Sumatera Barat berharap dapat berkontribusi secara signifikan dalam mendorong pengembangan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi. Pemerintahan seperti ini akan dapat memberikan layanan publik yang lebih baik dan meningkatkan daya saing daerah di era digital yang sulit. Diskominfo Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk terus melakukan inovasi, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, dan membangun infrastruktur dan teknologi yang diperlukan untuk mewujudkan visi Sumatera Barat untuk menjadi provinsi yang terdepan di Indonesia dalam menerapkan sistem pemerintahan elektronik.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) telah mencapai banyak hasil yang patut diapresiasi, terutama dalam mendukung transformasi digital di berbagai sektor pemerintahan. Kesuksesan ini jelas terlihat dari portofolio digital mereka yang luar biasa. Hingga saat ini, Diskominfo telah mengembangkan 141 aplikasi dan 65 website untuk memenuhi kebutuhan administrasi internal dan layanan publik. Inovasi digital ini menunjukkan kemampuan teknologi Diskominfo selain komitmen mereka untuk modernisasi layanan dan membangun pemerintahan berbasis teknologi yang lebih efektif, jujur, dan akuntabel. Diskominfo mengelola berbagai layanan digital yang mendukung berbagai aspek pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) adalah aplikasi di bidang administrasi kepegawaian yang dirancang untuk membantu manajemen sumber daya manusia dalam mengelola data pegawai. SIMPEG memungkinkan pencatatan data pegawai, riwayat jabatan, kinerja, dan berbagai hal lain yang terkait dengan administrasi kepegawaian. Selain SIMPEG, Diskominfo meluncurkan Aplikasi Madani. Aplikasi ini berfungsi sebagai platform untuk menilai kinerja karyawan secara lebih objektif dan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Tujuan dari peluncuran Aplikasi Madani adalah untuk mendorong budaya kerja yang lebih terukur dan produktif.

Diskominfo turut berkontribusi dengan mengembangkan berbagai aplikasi dan platform yang bertujuan untuk membuat masyarakat lebih mudah mendapatkan akses ke layanan pemerintahan. Web SIP Sakato dan Web DPMPTSP adalah inovasi penting dalam kategori ini. Platform ini berfungsi sebagai platform perizinan online yang memungkinkan masyarakat untuk mengurus izin tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan. Platform ini membuat proses perizinan lebih cepat, transparan, dan efektif, sehingga pengguna memiliki pengalaman layanan yang lebih baik. Selain itu, untuk mendukung transparansi dan keterbukaan informasi publik, Diskominfo meluncurkan Web JDIH, sarana digital untuk dokumentasi dan publikasi produk hukum. Aplikasi ini secara terintegrasi memberikan masyarakat dan pemangku kebijakan akses ke peraturan, keputusan, atau dokumen hukum lainnya secara daring.

Selain itu, Diskominfo meluncurkan Web Portal Data Sumbar, yang menunjukkan komitmennya terhadap pengelolaan data. Portal ini berfungsi sebagai agregator data yang mengintegrasikan informasi penting dari berbagai instansi pemerintahan. Portal ini juga berfungsi sebagai pusat informasi untuk keperluan perencanaan dan pengambilan kebijakan berbasis data. Untuk meningkatkan transparansi dalam pembangunan daerah, Diskominfo membuat Dashboard Pembangunan, sebuah platform yang memungkinkan masyarakat melacak pelaksanaan proyek pembangunan dan realisasi anggaran secara langsung. Platform ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dengan memberikan informasi yang akurat dan mudah diakses.

Dengan meluncurkan Aplikasi Pengelolaan Sampah, Diskominfo memberikan perhatian khusus pada masalah lingkungan. Aplikasi ini dimaksudkan untuk membantu optimalisasi layanan yang terkait dengan pengelolaan sampah, mulai dari pencatatan volume sampah, pengangkutan, hingga pelaporan tentang kebersihan lingkungan. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan lebih efektif, mendorong penciptaan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan aman.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara layanan komunikasi dan informatika di tingkat provinsi, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sumatera Barat menghadapi sejumlah masalah. Pemerintah menghadapi banyak hambatan untuk mempercepat transformasi digitalnya. Beberapa di antaranya adalah adanya keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan rendahnya kualitas SDM, efisiensi anggaran, resistensi terhadap teknologi, perbedaan generasi, dan ketakutan terhadap perubahan.

Diskominfo telah membuat rencana yang komprehensif dan berkelanjutan untuk menangani berbagai masalah tersebut. Sehingga antarmuka dan sistem informasi aplikasi dapat diakses dengan mudah oleh orang dari berbagai latar belakang, termasuk mereka yang belum terbiasa dengan teknologi, ini merupakan langkah strategis yang diambil. Metode ini digunakan untuk mengurangi tantangan teknis dan meningkatkan kenyamanan pengguna saat menggunakan aplikasi.

Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi. Sumber daya manusia ini tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan teknologi dan pelayanan publik berbasis digital. Untuk mengatasi masalah ini, Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan dan pelatihan intensif. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pegawai di berbagai bidang teknologi informasi dan Komunikasi. Diharapkan pelatihan ini akan memberi pegawai wawasan, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk mengikuti perkembangan teknologi yang terus berubah dan memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan lembaga pemerintah lainnya. Dengan peningkatan kemampuan ini, diharapkan kinerja pegawai akan menjadi lebih efisien dan efektif, yang akan membantu mencapai tujuan strategis dinas.

Selain keterbatasan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia, Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat juga menghadapi kendala anggaran yang menghambat pelaksanaan program kerja yang telah direncanakan sebelumnya. Untuk mengatasinya, dinas mengambil langkah strategis dengan mengubah target kerja agar lebih realistis dan sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia. Untuk mencapai hal ini, program-program yang dianggap prioritas dievaluasi kembali dan target yang terlalu tinggi dikurangi karena tidak sejalan dengan kemampuan anggaran. Penggunaan anggaran dapat lebih terarah dan tepat sasaran dengan cara ini, tanpa mengurangi efisiensi dan efektivitas program.

Meskipun perlu melakukan penyesuaian, Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat terus berupaya meningkatkan kualitas layanan dan memastikan bahwa tujuan utama dari setiap program tetap tercapai. Selain masalah sumber daya manusia dan anggaran, Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat juga sering menghadapi masalah ketidakberfungsian atau ketidakberfungsian aplikasi dan website yang dikelola. Untuk mengatasi masalah ini, dinas berusaha untuk meningkatkan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) agar setiap proses pengelolaan aplikasi dan website berjalan lebih lancar dan sesuai prosedur.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melanggar peraturan atau ketentuan akan ditindak tegas oleh Dinas Kominfo. Surat peringatan (SP) akan diberikan kepada OPD yang mengajukan permintaan pengelolaan aplikasi atau website tetapi tidak melakukannya sesuai prosedur. Jika peringatan ini tidak ditindaklanjuti, Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat akan menetapkan kebijakan untuk menolak permintaan serupa dari OPD yang bersangkutan di masa mendatang. Diharapkan bahwa kebijakan ini akan memiliki efek jera dan mendorong OPD terkait untuk mematuhi aturan yang berlaku. Ini akan memungkinkan aplikasi dan website yang dikelola beroperasi dengan lebih baik.

Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat berharap dapat meningkatkan layanan komunikasi dan informatika di pemerintahan dan masyarakat luas dengan mengatasi berbagai masalah dan kendala yang ada. Untuk menjaga stabilitas dan efektivitas kinerja dinas dan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, peningkatan kualitas SDM, pengelolaan anggaran yang lebih efisien, dan penegakan aturan dalam pengelolaan aplikasi dan website adalah kuncinya. Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat optimis dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan pemerintahan berbasis digital yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat melalui kerja sama dan komitmen yang kuat dari seluruh pegawai dan pemangku kepentingan terkait.

Diskominfo mempekerjakan karyawan muda, terutama programmer yang dapat menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi, untuk memperkuat tim pengembang dan mendukung pengembangan aplikasi yang lebih kreatif dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Strategi transformasi digital Diskominfo mengutamakan pendampingan dan pelatihan. Untuk meningkatkan literasi digital pegawai pemerintahan, mereka secara teratur mengadakan program pelatihan dan sosialisasi. Program ini membantu karyawan memahami manfaat dan cara menggunakan teknologi, sehingga mereka dapat menggunakan aplikasi dengan lebih percaya diri dan efisien. Dengan menggunakan kombinasi pendekatan teknis dan non-teknis yang lengkap, Diskominfo berharap dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi, mempercepat transformasi digital, dan pada akhirnya mewujudkan pemerintahan di era digital yang lebih canggih, inklusif, dan berdaya saing.

Dalam menghadapi berbagai bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan tsunami, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Sumatera Barat telah menunjukkan komitmen luar biasa untuk mendukung penguatan tata kelola pemerintahan berbasis TI dan komunikasi. Penanggulangan bencana merupakan salah satu masalah penting di provinsi ini. Salah satu inovasi unggulan yang patut dihargai adalah pengembangan Dashboard Kebencanaan, sebuah platform digital yang bertujuan untuk memberikan informasi secara real-time tentang bencana alam yang terjadi di wilayah Sumatera Barat. Dashboard ini berfungsi sebagai pusat informasi yang dapat diakses oleh pemerintah daerah, organisasi terkait, dan masyarakat umum secara keseluruhan, sehingga mereka dapat bekerja sama dan bekerja sama untuk menghadapi situasi darurat.Dengan data yang diperbarui secara berkala, pengguna dapat mengetahui lokasi bencana, tingkat keparahan, jumlah korban, potensi dampak lanjutan, dan saran untuk mitigasi risiko.

Dashboard Kebencanaan ini tidak hanya memberi orang informasi yang benar, tetapi juga sangat penting untuk mencegah masyarakat di lapangan dan pemangku kebijakan, seperti pimpinan daerah, berbagi informasi yang salah. Dalam banyak kasus, salah satu hambatan dalam penanggulangan bencana adalah aliran informasi yang lambat, yang dapat menyebabkan keputusan yang tidak tepat waktu atau tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Dashboard yang terintegrasi ini memungkinkan seluruh pihak yang berkepentingan mengakses data yang sama, yang memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat, akurat, dan terkoordinasi.Selain itu, Dashboard Kebencanaan membantu meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat karena memberikan informasi langsung tentang potensi bencana di wilayah masing-masing dan memberi tahu mereka tentang langkah-langkah antisipasi yang dapat mereka ambil sebelum bencana terjadi.

Diskominfo Provinsi Sumatera Barat telah membuat sistem evaluasi yang ketat namun fleksibel untuk memastikan bahwa inovasi digital yang dibuat terus berfungsi secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Salah satu kebijakan penting yang diterapkan adalah penangguhan atau penghentian aplikasi yang tidak menunjukkan aktivitas atau tidak digunakan dalam waktu dua tahun. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh aplikasi yang dikelola oleh Diskominfo benar-benar menguntungkan pengguna tanpa mengurangi kapasitas server atau anggaran pemeliharaan.Langkah ini menunjukkan komitmen Diskominfo untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya teknologi, sehingga aplikasi tidak hanya menjadi beban tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pelayanan publik.

Meskipun demikian, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait diberi wewenang untuk melakukan evaluasi substantif terkait efektivitas dan relevansi masing-masing aplikasi. Hal ini menunjukkan pendekatan desentralisasi yang diterapkan oleh Diskominfo dalam proses evaluasi; selain itu, setiap OPD diberi wewenang untuk menilai dan menentukan aplikasi apa yang akan digunakan di masa depan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas mereka sendiri. Namun, upaya Diskominfo Provinsi Sumatera Barat dalam mengembangkan layanan berbasis teknologi tidak terlepas dari berbagai masalah, terutama terkait dengan keterbatasan anggaran.

Dengan program efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat dan daerah, ada tekanan yang signifikan terhadap alokasi dana untuk proyek-proyek strategis di bidang TI. Akibatnya, beberapa program yang telah direncanakan sebelumnya dapat ditunda, dikurangi, atau bahkan dibatalkan. Tidak diragukan lagi, keadaan ini menjadi tantangan tersendiri bagi Diskominfo. Mereka harus mencari cara untuk mempertahankan keberlanjutan program digital mereka meskipun memiliki sumber daya yang terbatas. Namun demikian, Diskominfo Provinsi Sumatera Barat terus menunjukkan kemampuan untuk bertahan dan mengatasi berbagai tantangan tersebut. Mengembangkan model pendanaan yang lebih kreatif adalah salah satu upaya yang dilakukan.

Selain itu, mereka mencoba bekerja sama dengan lembaga donor, sektor swasta, dan komunitas teknologi lokal.Dengan dana terbatas, Diskominfo berusaha untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada, termasuk infrastruktur teknologi, sumber daya manusia, dan manajemen proyek. Ini dilakukan agar hasil yang diperoleh tetap maksimal. Di tengah semua kesulitan ini, Diskominfo terus berkomitmen untuk menyediakan layanan informasi digital berkualitas tinggi kepada masyarakat, dengan penekanan pada meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan publik dalam proses pembangunan daerah. Melalui inovasi dan kebijakan strategis, Diskominfo berharap dapat terus membantu Sumatera Barat menjadi provinsi yang tangguh, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan di era digital.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Sumatera Barat memiliki tugas strategis untuk mendorong transformasi digital dan membangun ekosistem pemerintahan berbasis teknologi informasi yang efisien, efektif, dan transparan. Diskominfo Sumatera Barat terus berinovasi untuk menyediakan solusi digital yang relevan dengan kondisi geografis dan potensi kerawanan wilayah ini terhadap bencana alam. Ini dilakukan seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat serta meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan digital yang mudah diakses dan informatif. Dashboard Kebencanaan adalah salah satu inovasi unggulan yang berhasil dikembangkan. Ini adalah platform digital yang bertujuan untuk memberikan informasi real-time tentang berbagai jenis bencana yang berpotensi terjadi di Sumatera Barat, seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan tsunami.

Dengan menyediakan data terkini yang dapat diakses oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga penanggulangan bencana, dan masyarakat umum, platform ini menjadi terobosan penting dalam mendukung upaya penanggulangan bencana. Dashboard Kebencanaan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan informasi aktual tentang bencana, tetapi juga bertujuan untuk mengatasi masalah yang sering terjadi dalam penanganan bencana: kurangnya informasi antara masyarakat yang terdampak langsung oleh bencana dan para pemimpin daerah. Dalam situasi darurat, kelancaran arus informasi sangat penting untuk memastikan bahwa penanganan darurat dilakukan dengan cepat, akurat, dan sesuai dengan keadaan di lapangan.Oleh karena itu, Dashboard Kebencanaan memiliki fitur canggih yang memungkinkan Anda mengakses data cepat tentang lokasi bencana, tingkat kerusakan, jumlah korban, dampak lanjutan yang mungkin terjadi, dan saran untuk mitigasi. Dengan fitur ini, diharapkan koordinasi yang lebih baik antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), komunitas relawan, dan masyarakat umum, dapat terjadi, sehingga respons terhadap bencana dapat menjadi lebih cepat dan efektif.

Dashboard Kebencanaan tidak hanya menawarkan keuntungan dalam situasi darurat, tetapi juga mendidik masyarakat tentang kesiapsiagaan. Masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kemungkinan bencana di daerah tempat tinggal mereka dan cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana dengan menggunakan informasi yang tersedia di platform ini.Ini sesuai dengan tujuan jangka panjang Diskominfo Provinsi Sumatera Barat untuk membangun masyarakat yang kuat, tahan bencana, dan mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan.

Diskominfo Provinsi Sumatera Barat juga menerapkan mekanisme evaluasi yang ketat namun fleksibel untuk memastikan bahwa inovasi digital yang dikembangkan tetap relevan dan memberikan manfaat yang maksimal. Kebijakan evaluasi mencakup penggunaan aplikasi digital yang dikelola oleh pemerintah daerah. Diskominfo menetapkan bahwa aplikasi yang tidak aktif atau tidak menunjukkan aktivitas yang signifikan akan ditangguhkan (suspend) selama dua tahun dalam upaya meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya teknologi. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya aplikasi yang benar-benar bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat yang akan dipertahankan dan dikembangkan.Aplikasi yang masih relevan dan memiliki dampak yang besar dapat didukung dengan lebih efektif dengan menggunakan kapasitas server yang terbatas dan anggaran pemeliharaan yang terbatas.

Meskipun demikian, kebijakan ini juga mencerminkan strategi desentralisasi yang digunakan Diskominfo selama proses evaluasi. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait ditugaskan untuk melakukan penilaian menyeluruh terkait efektivitas dan relevansi masing-masing aplikasi. Hal ini memungkinkan OPD untuk lebih memahami kebutuhan khusus dan tujuan penggunaan aplikasi tersebut.

Diskominfo mendorong partisipasi aktif dari setiap instansi pemerintah dalam memastikan bahwa aplikasi yang digunakan benar-benar mendukung pencapaian tujuan.Meskipun banyak inovasi dan kebijakan strategis telah diterapkan, proses transformasi digital di Diskominfo Provinsi Sumatera Barat masih menghadapi banyak tantangan, terutama terkait keterbatasan anggaran. Kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah memengaruhi Diskominfo, seperti halnya lembaga pemerintah lainnya.

Kebijakan ini mengurangi dana untuk proyek TI, yang dapat menyebabkan penundaan, pengurangan skala, atau bahkan pembatalan beberapa program strategis. Meningkatnya kebutuhan akan investasi dalam infrastruktur teknologi, yang mencakup peningkatan kapasitas server, pembuatan aplikasi baru, dan pelatihan sumber daya manusia (SDM) yang mahir dalam teknologi informasi, membuat masalah ini semakin sulit.Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Diskominfo Provinsi Sumatera Barat tetap kuat dan terus melanjutkan program digital yang telah dimulai. Organisasi ini terus mencari cara baru untuk mempertahankan program-program yang ada. Ini termasuk mengembangkan model pendanaan yang lebih inventif, bekerja sama dengan lembaga donor, sektor swasta, dan komunitas teknologi lokal, dan memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada.

Departemen Komunikasi dan Informasi terus berusaha untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan. Ini akan membantu mereka menghadapi tantangan di era digital yang semakin kompleks. Diskominfo Provinsi Sumatera Barat berharap segala upaya yang dilakukan akan berdampak positif bagi masyarakat dengan semangat inovasi, kerja sama, dan adaptasi.tidak hanya mempercepat dan mempermudah akses ke layanan digital dan informasi, tetapi juga membantu membangun tata kelola pemerintahan yang lebih jelas, jujur, dan terlibat.

Diskominfo juga berharap dapat membangun masyarakat yang lebih tangguh, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan di masa depan melalui penguatan koordinasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Tujuan dari semua ini adalah untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai provinsi yang cerdas, tangguh, dan berdaya saing di era teknologi yang berkembang pesat.

**KESIMPULAN**

Penelitian ini mengungkap dinamika implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Sumatera Barat, yang memperlihatkan kompleksitas transformasi digital pada level pemerintahan daerah. Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa upaya digitalisasi di Diskominfo Provinsi Sumatera Barat dihadapkan pada sejumlah tantangan signifikan namun berhasil menunjukkan progress yang konstruktif.

Secara kuantitatif, Diskominfo telah mengembangkan 141 aplikasi dan 65 website, yang mencerminkan komitmen kelembagaan dalam mendorong transformasi digital. Inovasi digital yang paling menonjol adalah Dashboard Kebencanaan, sebuah platform terintegrasi yang memberikan informasi real-time terkait potensi dan penanganan bencana, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.

Penelitian mengidentifikasi tiga tantangan utama dalam implementasi SIM: keterbatasan sumber daya manusia, kendala anggaran, dan resistensi terhadap perubahan teknologi. Diskominfo merespon tantangan tersebut melalui strategi komprehensif yang meliputi pelatihan intensif SDM, penyesuaian target kerja, dan mekanisme evaluasi digital yang fleksibel.

Pendekatan desentralistik yang diterapkan, di mana Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diberi ruang untuk mengajukan kebutuhan sistem informasi, menunjukkan model kolaboratif dalam transformasi digital. Hal ini berbeda dengan pendekatan top-down konvensional dan mencerminkan adaptabilitas kelembagaan dalam menghadapi kompleksitas teknologi informasi.

Signifikansi penelitian terletak pada pemaparannya terhadap dinamika implementasi SIM di level pemerintahan daerah, yang selama ini kurang mendapatkan perhatian akademis. Studi ini tidak sekadar mendeskripsikan capaian, namun juga mengeksplorasi tantangan substantif yang dihadapi dalam proses transformasi digital.

Keterbatasan penelitian mencakup ruang lingkup yang terbatas pada satu instansi pemerintahan daerah, sehingga generalisasi temuan perlu dilakukan dengan kehati-hatian. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah memperluas cakupan penelitian ke wilayah dan instansi yang lebih beragam untuk mendapatkan perspektif komprehensif tentang implementasi SIM di Indonesia.

Sebagai kesimpulan, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam memahami dinamika transformasi digital pada level pemerintahan daerah, dengan menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SIM tidak sekadar bergantung pada kecanggihan teknologi, melainkan pada kemampuan adaptasi kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, dan pendekatan kolaboratif.

**DAFTAR PUSTAKA**

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches.* Sage publications.

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2011). *The Sage handbook of qualitative research*. sage.

Handoko, T. H. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.

Indrajit, R. (2022). *Transformasi Digital dalam Tata Kelola Pemerintahan*. Jakarta: Penerbit XYZ.

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2004). *Management information systems: Managing the digital firm*. Pearson Educación.

Lipursari, D. (2013). *Peran Teknologi Informasi dalam Masyarakat Modern*. Jurnal Teknologi dan Masyarakat, 5(2), 45-60.

McLeod, R., Neurani, A., & Ferdian, R. (2018). *Information Systems: A Managerial Approach*. Jakarta: Penerbit ABC.

Miles, M. B. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. Thousand Oaks.

Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif, cet. XI*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mulyono, A. (2023). *Tantangan Implementasi Sistem Informasi Manajemen di Sektor Publik*. Jurnal Administrasi Publik, 10(1), 15-30.

Napitupulu, D., Syafrullah, M., Rahim, R., Abdullah, D., & Setiawan, M. I. (2018, April). *Analysis of user readiness toward ICT usage at small medium enterprise in south tangerang*. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1007, p. 012042). IOP Publishing.

Napitupulu, E., et al. (2020). *E-Government di Indonesia: Peluang dan Tantangan*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 8(3), 100-115.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. (2019). Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektro

Permana, R. (2021). *Ketersediaan Infrastruktur Teknologi dalam Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi*. Jurnal Teknologi dan Kebijakan Publik, 6(1), 25-40.

Puspaningrum, D. (2020). *Perkembangan Sistem Informasi Manajemen di Era Digital*. Jurnal Manajemen dan Bisnis, 12(4), 200-215.

Ruliana, S. (2019). *Strategi Komunikasi dalam Penyampaian Informasi Publik*. Jurnal Komunikasi dan Media, 7(2), 75-90.

Suri, A., & Puspaningrum, D. (2020). *Transformasi Digital dalam Bisnis dan Manajemen*. Jurnal Bisnis dan Manajemen, 15(3), 150-165.

Sutabri, T. (2022). *Implementasi Perangkat Pendukung Sistem Informasi Manajemen di Pemerintahan Daerah*. Jurnal Administrasi Negara, 9(2), 50-65.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Yunis, M., et al. (2022). *Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi di Sumatera Barat*. Jurnal Teknologi dan Pembangunan, 11(1), 30-45.

Zulhendra, & Putri, R. (2022). *Hambatan dalam Optimalisasi Layanan Administrasi Publik*. Jurnal Administrasi Publik, 10(2), 100-115.